

KLIPING BERITA MEDIA MASSA

Sabtu-Senin, 14-16 Maret 2020



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia, Halaman 7	Senin, 16 Maret 2020	Peluang Investasi Utama Banjir	Kawasan segitiga emas Rebana (Patimban-KertajatiCirebon) digadang-gadang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia.
2	Bisnis Indonesia, Halaman 21	Senin, 16 Maret 2020	Prakualifikasi 2018, Pemenang Diumumkan Tahun Ini	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha pelaksana pemenang lelang proyek preservasi jalan nasional di Sumatra Selatan bisa dilakukan tahun ini. Padahal, pengumuman peserta yang lulus prakualifikasi proyek tersebut sudah dilaksanakan pada Agustus 2018.
3	Bisnis Indonesia, Halaman 21	Senin, 16 Maret 2020	PUPR Susun Protokol Kelanjutan Proyek	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun protokol kelangsungan proyek infrastruktur yang tengah berjalan terkait dengan penyebaran virus corona di Indonesia.
4	Media Indonesia, Halaman 11	Senin, 16 Maret 2020	3 Sirip Tol Trans- Sumatra Rampung 2023	Pemerintah pusat berfokus melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatra. Saat ini tengah dikerjakan pembangunan tiga sirip Tol Trans – Sumatra, yakni Palembang-Bengkulu, Pekanbaru-Padang, dan Tebing Tinggi-Sibolga
5	Tempo, Halaman 2-5	Senin, 16 Maret 2020	Pemerintah Siapkan Infrastruktur Air Bersih Ibukota Baru	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai mengerjakan infrastruktur penunjang ibukota negara baru di Kalimantan Timur pada paruh kedua tahun ini.

Judul	Peluang Investasi Utama Banjir	Tanggal	Senin, 16 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 7		
Resume	Kawasan segitiga emas Rebana (Patimban-Kertajati-Cirebon) digadang-gadang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia.		

| JELAJAH SEGITIGA REBANA |

PELUANG INVESTASI UTAMA JABAR

Kawasan segitiga emas Rebana (Patimban-Kertajati-Cirebon) digadang-gadang akan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) terbesar di Indonesia.

Tim Jelajah Segitiga Rebana
redaksi@bisnis.com

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan bahwa kawasan yang berada di wilayah utara Jawa Barat ini membutuhkan banyak suntikan investasi. Kawasan yang masih dimatangkan urusan tata ruangnya tersebut juga menjadi jualan utama Provinsi Jawa Barat kepada investor asing. "Daerah ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, ini wilayah di mana pelabuhan terbesar berdekatan dengan bandara terbesar. Pelabuhan [Patimban] tengah dibangun dibiayai Pemerintah Jepang, berdekatan dengan Bandara Kertajati yang sudah beroperasi. Tanahnya masih murah, upah

buruh salah satu paling rendah di Jawa Barat," katanya kepada *Bisnis*.

Investasi di kawasan ini, lanjut Gubernur, cocok bagi pengusaha Jepang karena bakal menguntungkan dari sisi bisnis. Ketersediaan konektivitas kawasan memudahkan proses pengiriman barang ekspor dan impor. Selain itu, pemerintah Indonesia akan mengeluarkan kebijakan diskon pajak bagi perusahaan manufaktur yang membuka fasilitas vokasi bagi warga lokal hingga 300%.

"Jadi, kalau nanti berinvestasi di Jawa Barat, ekspor ke mana-mana akan mudah karena pelabuhannya di-desain kelas dunia yang dibangun kontraktor Jepang," kata Gubernur.

Kepala Bidang Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Barat Diding Abidin mengatakan wilayah

KESIAPAN LAHAN SEGITIGA EMAS PATIMBAN-KERTAJATI-CIREBON

Fasilitas:
Pelabuhan dan
Bandara Internasi-
onal, KEK, dan
jalan tol

Patimban:
5.500 ha
[RTRW
Subang]

Kertajati:
Aerocity
(3.480 ha)
dimungkinkan
hingga 9.600 ha

Cirebon:
10.000 ha
[RTRW Cirebon]



bank bjb





Bupati Majalengka
Karna Sobahi

"Kami berkomitmen bagaimana investor merasa aman, nyaman, dan sejuk melaksanakan investasinya di Majalengka"



Gubernur
Jawa Barat
Ridwan Kamil

"Daerah ini memiliki keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain di Indonesia, ini wilayah dimana pelabuhan terbesar berdekatan dengan bandara terbesar. Pelabuhan [Patimban]-nya tengah dibangun dibiayai pemerintah Jepang, berdekatan dengan Bandara Kertajati yang sudah beroperasi. Tanahnya masih murah, upah buruh salah satu paling rendah di Jawa Barat"



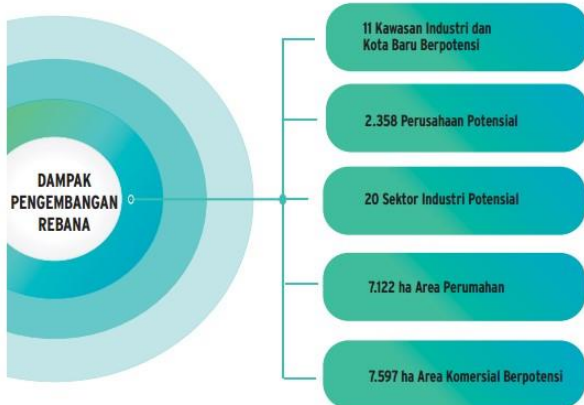
Menko Perekonomian
Airangga Hartarto

"Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan pertumbuhan ekonominya berbasis industri, yang kontribusinya mampu mendekati 40%. Kalau kita kembangkan lagi di koridor timur, potensi pembangunannya akan lebih bisa ditingkatkan"

"Kehadiran Tol Cisumdawu akan memperlancar akses kendaraan dari Bandung yang menuju Bandara Kertajati di Majalengka dan mendukung pengembangan kawasan 'segitiga emas' Cirebon-Subang-Majalengka sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru"

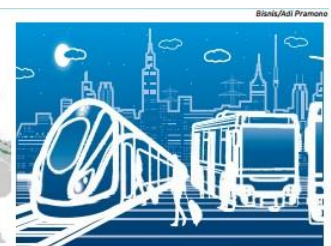


Presiden
Joko Widodo



PROYEK PENDUKUNG REBANA

- 1 Pengelolaan Limbah Padat Cirebon
- 2 Bandara Internasional Jawa Barat
- 3 Segitiga Emas Rebana
- 4 Pengelolaan Waduk Jatigede
- 5 Pengelolaan Sinumbra
- 6 Pengelolaan Legoknangka
- 7 Monorail Bandung



AKSES PENDUKUNG

- Kereta Cepat
- Monorail/LRT Bandung
- Bandara
- Pelabuhan
- Pembangunan Jalan Tol
- Perencanaan Jalan Tol
- Jalan Tol yang Ada
- Kereta Berkecepatan Tinggi
- Rencana Pembangunan Rel Kereta
- Re-aktivasi Rel Kereta
- Rel Kereta Aktif

Judul	Prakualifikasi 2018, Pemenang Diumumkan Tahun Ini	Tanggal	Senin, 16 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 21		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha pelaksana pemenang lelang proyek preservasi jalan nasional di Sumatra Selatan bisa dilakukan tahun ini. Padahal, pengumuman peserta yang lulus prakualifikasi proyek tersebut sudah dilaksanakan pada Agustus 2018.		

| PRESERVASI JALINTIM DI SUMSEL |

PRAKUALIFIKASI 2018, PEMENANG DIUMUMKAN TAHUN INI

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan penandatanganan kontrak kerja sama dengan badan usaha pelaksana pemenang lelang proyek preservasi jalan nasional di Sumatra Selatan bisa dilakukan tahun ini. Padahal, pengumuman peserta yang lulus prakualifikasi proyek tersebut sudah dilaksanakan pada Agustus 2018.

Agne Yasa
agneyasa@bisnis.com

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan proses tinjauan (*review*) untuk proyek jalan lintas timur di Sumatra Selatan tersebut.

"[Jalan lintas timur di Sumsel] masih dalam tahap evaluasi. Karena ini masih tahap evaluasi lelang tentu belum bisa diberikan info detailnya. [Penandatanganan kontrak] kami harapkan pada tahun ini," katanya kepada *Bisnis*, Minggu (15/3).

Menurut Hedy, skema ketersediaan layanan (*availability payment*) memang menjadi suatu hal yang baru untuk proyek jalan bukan tol. Oleh karena itu, katanya, wajar jika investor atau badan usaha masih mempelajarinya, termasuk ketika untuk memenuhi persyaratan lelang.

"Ya, karena ini sesuatu yang baru, jadi, pengusaha-pengusaha banyak yang mungkin sambil jalan *learning*, bagaimana agar itu memenuhi persyaratan-persyarat-

an dan lulus prakualifikasi dan sebagainya. Saya kira ini proses pembelajaran saja," tutur Hedy. Proyek preservasi jalan lintas timur (jalintim) di Sumatra Selatan tersebut ditawarkan sepanjang 30 kilometer dan menelan biaya investasi Rp1,35 triliun.

Investasi dari badan usaha akan dikembalikan lewat pola ketersediaan layanan selama masa kerja sama sepanjang 15 tahun. Pembayaran akan dicairkan bila badan usaha memenuhi standar layanan yang telah disepakati.

Berdasarkan data catatan *Bisnis*, sejak Agustus 2018, sebanyak enam peserta sudah dinyatakan lulus tahap prakualifikasi.

Keenam peserta itu adalah PT Waskita Karya Tbk., PT Wijaya Karya Tbk., PT PP (Persero) Tbk.; konsorsium PT Adhi Karya Tbk. dan PT Brantas Abipraya (Persero); kerja sama operasi PT Nusantara Infrastructure Tbk. dan PT Acset Indonesia Tbk.; dan konsorsium PT Sumber Mitra Jaya (SMJ) dan Modern.

Lingkup proyek meliputi pekerjaan jalan dan jembatan beserta bangunan/struktur pendukungnya seperti pembiayaan, perencanaan teknis (rencana teknis akhir),

pelaksanaan konstruksi, pemeliharaan pada masa konstruksi, pemeliharaan pada masa layanan, dan penyerahan kembali.

PERMINTAAN PENAWARAN

Sebelumnya, pada Juli 2019, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR ketika itu Sugiyarto mengatakan bahwa ada enam peserta yang dinyatakan lulus tahap prakualifikasi.

Selanjutnya, tahapan bakal berlanjut sehingga tahap permintaan penawaran atau *request for proposal* (RFP). Tahap ini menandai pembukaan proses pelelangan.

"Bulan ini, kami mulai ke tahap *request for proposal*. Kami harapkan selesai lelangnya tahun ini," ujarnya. (*Bisnis*, 8 Juli 2019)

Adapun, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero), pihak yang turut membantu penyiapan proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) preservasi jalintim di Sumsel, menyebut ruang lingkup proyek tidak akan berubah secara signifikan.

Direktur PII Armand Hermawan mengatakan bahwa preservasi jalintim di Sumsel akan tetap menggunakan skema keter-

sediaan layanan sebagai bentuk pengembalian investasi kepada badan usaha.

"Strukturanya masih sama, panjang jalan dan teknis masih sama. Jika ada perubahan, sangat tidak signifikan," kata Armand saat itu.

PII, katanya, siap memberi penjaminan untuk proyek KPBU preservasi jalintim di Sumsel. Risiko yang akan ditanggung, antara lain risiko politik, risiko gagal bayar, dan risiko terminasi. Proyek ini sekaligus menjadi proyek jalan bukan tol pertama yang dijamin oleh PII.

Sementara itu, pada Rabu (11/3), Kementerian PUPR juga telah melakukan peninjauan minat pasar (*market sounding*) untuk proyek yang sama di Provinsi Riau.

Dalam dokumen studi kelayakan, proyek preservasi jalintim di Riau ini memiliki panjang 43 kilometer dengan biaya investasi Rp585,30 miliar.

Ruas jalan yang direkonstruksi atau dipreservasi yaitu Jalan Simpang Kayu Ara (Pekanbaru)—Batas Kabupaten Pelalawan dengan panjang 3,60 kilometer, Jalan Pelalawan—Si-

kijing Mati sepanjang 9,10 kilometer, dan Jalan Sikijang Mati—Simpang Lago dengan panjang 30,30 kilometer sehingga panjang keseluruhan adalah 43 kilometer.

"Mungkin di *market sounding* ini kami mencoba sesuatu yang baru yaitu preservasi dengan skema *availability payment*. Tahun ini pertama kami coba nontol. Kalau yang ini bayarnya pemerintah dengan cicilan sama seperti kalau beli rumah, *nyicil*. Jadi, jalannya nanti tidak tol, satu ruas di jalan nasional lintas timur Riau."

Hedy menambahkan bahwa jalan lintas timur di Riau ini nantinya masih satu koridor dengan jalintim di Sumsel.

Preservasi jalintim di Riau ditargetkan selesai dalam waktu 8 bulan dan penandatanganan perjanjian KPBU dapat dilaksanakan pada Desember 2020.

Untuk proyek preservasi jalintim di Riau ini, tentunya, peminatnya juga mirip dengan proyek preservasi jalintim di Sumsel. "Tinggi rendahnya peminat diperkirakan mirip dengan yang Sumsel." ■

BUTUH WAKTU PANJANG

Sektor
Infrastruktur Jalan

Panjang
30 kilometer

Total belanja modal
Rp1,35 triliun

Total belanja modal & biaya operasi (15 tahun)
Rp1,90 triliun

Penanggung jawab proyek kerja sama
Menteri PUPR didelegasikan kepada Dirjen Bina Marga

Status

Proyek sudah menyelesaikan tahap prakualifikasi, saat ini sedang mempersiapkan dokumen *request for proposal* awal, pengajuan konfirmasi final kepada Kementerian Keuangan, dan usulan penjaminan kepada PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia

Sumber: kpbu.djpprc.kemken.go.id
BISNIS/THI UTOOMO

Masa konstruksi
3 tahun

Masa konsesi
15 tahun (3 tahun masa konstruksi dan 12 tahun masa layanan)

Skema pengembalian proyek
Pembayaran ketersediaan layanan (*availability payment*)

Pengumuman prakualifikasi
Agustus 2018

Badan usaha dinyatakan lulus prakualifikasi

1. PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
2. Konsorsium PT Adhi Karya Tbk dan PT Brantas Abipraya
3. PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;
4. PT PP (Persero) Tbk;
5. Kerja sama operasi PT Nusantara Infrastructure Tbk. dan Acset
6. Konsorsium SMJ-Modern.

Proyek
KPBU
Preservasi
Jalintim
di Sumsel

Lelang proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha untuk preservasi jalan nasional lintas timur Sumatra di Provinsi Sumatra Selatan tergolong memakan waktu yang panjang. Meskipun pemenang tahap prakualifikasi sudah diumumkan pada Agustus 2018, hingga kini pemenang lelang belum diketahui. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menargetkan pemenang lelang bisa diumumkan tahun ini.

Judul	PUPR Susun Protokol Kelanjutan Proyek	Tanggal	Senin, 16 Maret 2020
Media	Bisnis Indonesia, Halaman 21		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun protokol kelangsungan proyek infrastruktur yang tengah berjalan terkait dengan penyebaran virus corona di Indonesia.		

| DAMPAK VIRUS CORONA |

PUPR Susun Protokol Kelanjutan Proyek

Bisnis, JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tengah menyusun protokol kelangsungan proyek infrastruktur yang tengah berjalan terkait dengan penyebaran virus corona di Indonesia.

“Sementara ini sedang disiapkan protokolnya, jika sudah selesai akan diinfokan,” kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Trisasongko Widiyanto kepada *Bisnis*, Minggu (15/3).

Berdasarkan data Ditjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan, hingga saat ini ada 31 proyek senilai Rp354,69 triliun kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) yang berada pada tahap konstruksi.

Ke-31 proyek KPBU yang merupakan prakarsa pemerintah (*solicited*) itu terdiri

atas 25 proyek jalan tol, tiga proyek sistem penyediaan air minum, satu proyek tempat pembuangan akhir, satu proyek pembangkit listrik tenaga sampah, dan satu tempat pembuangan dan pemrosesan akhir sampah.

Sementara itu, ada 4 proyek KPBU senilai Rp40,25 triliun yang diprakarsai badan usaha (*unsolicited*) yang berada pada tahap konstruksi dan terdiri atas 3 proyek jalan tol dan 1 proyek sistem penyediaan air minum.

Sebelumnya diberitakan, hingga akhir Februari belum ada proyek infrastruktur yang pembiayaannya berasal dari China terdampak akibat pandemi corona. China menjadi negara pertama ditemukannya kasus corona.

Dari data Ditjen Bina Konstruksi berdasarkan sistem laporan tahunan badan usaha

jasa konstruksi asing atau penanaman modal asing terdapat 15 proyek konstruksi di seluruh kementerian atau lembaga yang pendanaannya berasal dari pinjaman China dan proyek berakhir pada 2020—2023.

Di Kementerian PUPR terdapat dua proyek yang dibiayai dari pinjaman China yaitu pengembangan jalan tol fase kedua Cileunyi—Dawuan—Sumedang (Cisumdawu) yang berakhir pada 2020 dan pengembangan Cisumdawu fase ketiga yang akan dimulai tahun ini.

Terkait dengan tenaga kerja asing yang terdampak virus corona, Kementerian PUPR juga akan mengikuti kebijakan dari kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Kesehatan dan Kementerian Tenaga Kerja.

(Agne Yasa)

Judul	3 Sirip Tol Trans-Sumatra Rampung 2023	Tanggal	Senin, 16 Maret 2020
Media	Media Indonesia, Halaman 11		
Resume	Pemerintah pusat berfokus melanjutkan pembangunan Tol Trans Sumatra. Saat ini tengah dikerjakan pembangunan tiga sirip Tol Trans – Sumatra, yakni Palembang-Bengkulu, Pekanbaru-Padang, dan Tebing Tinggi-Sibolga		

3 Sirip Tol Trans-Sumatra Rampung 2023

PEMERINTAH pusat berfokus melanjutkan pembangunan Tol Trans-Sumatra. Saat ini tengah dikerjakan pembangunan tiga sirip Tol Trans-Sumatra, yakni Palembang-Bengkulu, Pekanbaru-Padang, dan Tebing Tinggi-Sibolga.

Ketiga ruas tol tersebut ditargetkan bisa rampung pada 2023. Khusus untuk Tol Palembang-Bengkulu, sejak Agustus 2019 sudah dimulai pembebasan lahan yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menurut rencana, pada awal April 2020 nanti akan

mulai dilakukan pekerjaan pembangunan fisik tol tersebut. "Kami, dari pengembang jalan tol, sudah mulai membangun ruas Palembang-Bengkulu dari 2019 lalu. Pembebasan lahan sudah berjalan dan rencananya awal bulan depan mulai dikerjakan fisik bangunannya," kata Manajer Proyek PT Hutama Karya, Hasan Turcahyo.

Dia menjelaskan ruas Palembang-Bengkulu memiliki panjang 329 km yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu Indralaya-Muara Enim 119 km, Muara Enim-Lubuklinggau 112 km, dan Lubukling-

gau-Bengkulu 98 km.

"Jika tol sudah selesai dibangun, jarak sepanjang 329 km tersebut bisa ditempuh dengan waktu 3 jam."

Saat ini, lanjut Hasan, pihaknya masih mempersiapkan pengerjaan fisik tol tersebut, seperti memproduksi beton, tiang, dan pembersihan lahan. "Kami optimistis untuk tol ini bisa selesai pada 2023 sehingga bisa langsung dimanfaatkan masyarakat," ujarnya.

Nilai investasi

Terkait dengan besarnya investasi untuk membangun ruas Palembang-Bengkulu, Hasan mengungkapkan pihaknya menyiapkan dana sekitar Rp80 triliun. Adapun total pembiayaan untuk seluruh sirip Tol Trans-Sumatra mencapai Rp476 triliun.

Dia menerangkan investasi tersebut tidak hanya mencakup pengerjaan ruas tol, tetapi juga biaya kontruksi, konsultan, amdal, dan bunga

bank. "Rencana pemerintah untuk membangun tol perlu disosialisasikan dan masyarakat harus tahu. Karena itu, dalam HUT ke-59 Hutama Karya kami menggelar pesta rakyat dan pasar murah di Ogan Ilir bertema *Pasar raya Sumatra*," cetusnya.

Kepala Cabang Tol Palembang-Indralaya, Darmawan Edison, menambahkan kegiatan itu digelar dalam bentuk pesta rakyat agar semua lapisan masyarakat dapat menikmatinya.

"Hal ini juga sejalan dengan tema HUT kami tahun ini, yaitu menghubungkan kebaikan melalui pembangunan infrastruktur untuk Indonesia maju," kata Darmawan.

Dengan begitu, jalan Tol Trans-Sumatra yang dibangun dan dioperasikan Hutama Karya dapat menyambungkan konektivitas dan berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat di sekitarnya." (DW/N-3)

Judul	Pemerintah Siapkan Infrastruktur Air Bersih Ibukota Baru	Tanggal	Senin, 16 Maret 2020
Media	Tempo, Halaman 2-5		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai mengerjakan infrastruktur penunjang ibukota negara baru di Kalimantan Timur pada paruh kedua tahun ini.		

Pemerintah Siapkan Infrastruktur Air Bersih Ibu Kota Baru

Pembangunan proyek ditargetkan dimulai pada Oktober 2020.

EDISI, 16 MARET 2020



Warga di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Agustus 2019.

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mulai mengerjakan infrastruktur penunjang ibu kota negara baru di Kalimantan Timur pada paruh kedua tahun ini. Selain jalan dan jembatan, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan lembaganya tengah menyiapkan berbagai proyek penunjang air bersih untuk penghuni pusat pemerintahan nanti. "Fokus kami baru untuk kawasan inti ibu kota ya, sudah diidentifikasi empat atau lima bendungan," ujarnya, akhir pekan lalu.

Menurut Danis, proyek pertama yang sudah memasuki tahap lelang adalah Bendungan Sepaku Semoi di Desa Tengin Baru, Kabupaten Penajam Paser Utara. Dengan daya tampung hampir 11 juta meter kubik, arusnya yang mencapai 2.000 liter per detik awalnya akan memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan. Proyek senilai Rp 670 miliar itu masih dibiayai dana Anggaran Pendapatan dan Belanja

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Jaring Pengaman Sosial

Pemerintah Siapkan Infrastruktur Air Bersih Ibu Kota Baru

Co-Founder Docquity, Amit Vithal:

Pelaku Industri Waspada Lonjakan Impor

BERITA TERPOPULER

by Dastilo

Lebih Serius Hadapi Corona - Editorial

Pelaku Industri Waspada Lonjakan Impor - Ekonomi dan Bisnis

Simpan barang ini di dompet anda akan selalu punya uang!

Money Aritul

Negara tahun ini.

Kementerian pun memetakan sejumlah alternatif sumber air lain, seperti Bendungan Batu Lepek di Kabupaten Kutai Kartanegara yang bisa mengasup ibu kota hingga 14.300 liter air per detik. "Masih kami kaji desainnya," kata dia. "Ada juga opsi mengambil air baku dari hulu Sungai Mahakam, hanya sekitar 140 kilometer dari lokasi ibu kota."

Dalam proyeksi tahapan pemindahan ibu kota, pemerintah masih harus merampungkan pengadaan lahan, penyiapan desain induk, serta regulasi penunjang pada tahun ini. Infrastruktur pertama ibu kota akan dibangun di kawasan inti seluas 5.644 hektare, kemudian diperluas menjadi 56 ribu hektare. Di tahap akhir, pusat pemerintahan akan dilengkapi berbagai sarana pendukung dan dibentuk hingga mencapai luas optimal 256 hektare.

Baca Juga

by Doble

- Pembentukan Ibu Kota Baru Mulai Tahun Depan - Ekonomi dan Bisnis
- Belajar di Rumah Lewat WhatsApp - Metro
- Fakhri Menolak Jadi Asisten Pelatih - Olah Raga
- Desain Ibu Kota Baru Selesai pada Pertengahan 2020 - Peristiwa
- Uang selalu datang, jika benda ini ada dirumah!
- Simpang Susun Semanggi Hampir Sempurna - Laporan Utama

Money Atnul

Danis mengatakan lembaganya baru sekadar memantapkan desain basis perkotaan. Belum ada alokasi biaya fisik yang bisa dikeluarkan Kementerian jika Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara dan desain induk ibu yang dikerjakan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) belum rampung.

Meski begitu, dia memperkirakan peletakan baru pertama bisa dilakukan pada Oktober mendatang. "Perkiraan uang muka untuk pembangunan pertama Rp 200-300 miliar."

Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan Bappenas, Diani Sadia Wati, sebelumnya juga memperkirakan regulasi ibu kota baru bisa selesai pada pertengahan tahun ini. Pembahasannya berjalan bersamaan dengan pembentukan Badan Otorita Ibu Kota Baru.

Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja mengatakan sejumlah proyek pembuka masih akan dibiayai dengan kas negara. "Swasta biasanya tertarik kalau ada yang berkaitan dengan proyek energi, nilainya kan beda," kata dia kepada Tempo, kemarin.

Bila ingin mengusulkan proyek, Endra melanjutkan, pemodal swasta harus melewati serangkaian tahap studi kelayakan dan penilaian di Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur PUPR. "Dikaji rate return dan masa konsesinya, setelahnya baru bisa lelang dan kontrak."

Dikerjakan Bertahap

KEMENTERIAN Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mulai "menicci" pengerjaan infrastruktur ibu kota negara baru menjelang akhir tahun ini, sambil menunggu rampungnya pembahasan desain induk dan regulasi mengenai konsep pembangunan ibu kota. Bila sesuai dengan rencana, Kementerian PUPR menggalang konstruksi pemangkas di bidang kebidanan dan sumber daya air, sebelum bergerak ke sektor perumahan dan tata kota.

Proyeksi Biaya Kebutuhan Infrastruktur IKN 2020-2024

(data hingga November 2019)

Proyeksi nilai setiap sektor (Rp, triliun)

Proyek jalan dan jembatan	5,5
Proyek sumber daya air	0,9
Proyek sarana/prasarana permukiman	24,8
Proyek perumahan	211,4
Total	Rp 256 triliun

Skenario Pembiayaan Total Pemindahan Ibu Kota

Skenario kerja sama pemerintah badan usaha (KPSB)

Proyeksi kebutuhan total

Rp 400 triliun

APBN Rp 64,4 triliun

Investasi langsung BUKH dan swasta Rp 133,2 triliun

SUMBER: BAPPENAS, KEMENTERIAN PUPR, YOHANES PASKALIS/RIJDALE



Sekretaris Perusahaan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Mahendra Wijaya mengatakan entitasnya akan menyambut peluang proyek di ibu kota baru. Perusahaan masih menunggu pemerintah merinci jenis pekerjaan yang akan tersedia. "Perhatian kami ke infrastruktur pembangkit, water treatment, bangunan, serta pengembangan kawasan yang memang menjadi core bisnis WKA selama ini," katanya.

Direktur Utama PT Waskita Karya (Persero) Tbk I Gusti Ngurah Putra pun berancang-ancang mencari proyek baru sambil menunggu rampungnya desain induk ibu kota negara. Belum ada rencana kerja terkait dengan ibu kota negara dalam target kontrak baru Waskita Karya yang tahun ini mencapai Rp 48 triliun. "Yang pasti ibu kota butuh jalan, gedung, perumahan, dan setrum. Saya belum tahu persis ambil yang mana karena desainnya belum jadi," ucapnya kepada Tempo.

FAJAR PEBRIANTO | YOHANES PASKALIS